

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Di akhir abad 19, negara-negara di dunia semakin mempererat kerja sama terutama dalam bidang ekonomi. Hal tersebut diperkuat setelah pembentukan WTO sebagai organisasi yang berfokus pada kerja sama perdagangan internasional. Berdasarkan data yang diambil dari halaman resmi WTO, jumlah anggota WTO meningkat dari 134 negara pada tahun 1999 menjadi 164 negara di tahun 2016 (WTO, 2016).

Pada awalnya, WTO diharapkan mampu mengakomodasi perjanjian dagang negara di dunia. Namun saat ini, banyaknya anggota WTO membuat mekanisme pembuatan keputusan berjalan lambat dan membuat negara di dunia mulai mencari mekanisme alternatif perjanjian yang jauh lebih efektif. Negara di dunia kemudian memutuskan untuk melakukan kerja sama yang bersifat bilateral dan regional dibandingkan multilateral karena dianggap lebih menguntungkan mereka terutama dalam hal proses pembuatan kebijakan yang mampu memberikan dampak baik pada perekonomian negara anggota (Wilson, 2013).

Beberapa hal yang melatarbelakangi preferensi negara untuk terlibat di perjanjian dagang yang bersifat regional dan bilateral dibandingkan multilateral adalah karena beberapa hal seperti: adanya kesempatan yang jauh lebih besar untuk mendapatkan keuntungan karena jumlah anggota yang terlibat perjanjian jauh lebih

sedikit dan karena peraturan yang lebih fleksibel yang bisa diatur bersama seperti tarif masuk sebuah barang, adanya keyakinan bahwa dengan anggota yang lebih sedikit maka keamanan negara akan lebih terjamin, adanya akses yang lebih mudah dan cepat bagi suatu negara untuk mengakses pasar negara lain terutama negara yang lebih besar ke negara kecil sebagai contoh US-Canada, dan untuk meningkatkan bargaining position sebuah negara ke tingkat yang jauh lebih tinggi seperti multilateral (Whalley, 1998, pp. 71-74) .

Salah satu bentuk kerjasama regional yang dibentuk untuk mempercepat perekonomian negara anggota adalah Mercado Comun Del Sur (Mercosur). Mercosur adalah blok perdagangan regional di wilayah Amerika Latin yang memiliki lima negara anggota yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay dan Venezuela di mana bertujuan untuk memudahkan pergerakan modal, barang dan jasa antar sesama anggota dan sektor perekonomian yang nantinya berdampak pada kesejahteraan regional tersebut.

Dalam proses pembentukan blok Mercosur, Brazil dan Argentina merupakan aktor yang sangat berpengaruh. Mercosur merupakan perkembangan dari kerjasama bilateral antara Argentina dan Brazil melalui deklarasi FOZ de Iguazu tahun 1985, Perjanjian Buenos Aires 1990 dan Treaty of Asuncion pada tahun 1991. Pada awalnya Mercosur merupakan blok perdagangan yang cukup berhasil dalam memajukan perekonomian negara anggota yang dibuktikan pada meningkatnya FDI sebesar 25% pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 angka arus masuk tahunan FDI di amerika latin sebesar 50 miliar USD atau sebesar 17.7 %. Namun, keberhasilan Mercosur tidak berlangsung lama dimana pada akhir tahun 90an krisis ekonomi

internasional mempengaruhi proses integrasi Mercosur dan menjadi tantangan blok perdagangan tersebut sampai saat ini. Menurut Gabriela Lomeu Campos, kegagalan Mercosur dalam melakukan integrasi dibagi disebabkan tiga hal yaitu: krisis ekonomi, lemahnya institusi Mercosur dan perbedaan kepemimpinan di negara anggota (Campos, 2016, p. 876).

Krisis ekonomi yang melanda Mexico dan Rusia di akhir tahun 90an secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara anggota Mercosur. Krisis di Amerika Latin dimulai ketika Brazil melakukan devaluasi mata uang yang berdampak pada krisis ekonomi di Argentina. Hal tersebut membuat negara anggota Mercosur khususnya Argentina dan Brazil melakukan penundaan terbentuknya custom market dan fokus kepada permasalahan ekonomi dalam negeri. Akibatnya, negara membentuk kebijakan ekonomi dan politik yang berbeda satu sama lain. Argentina membuat kebijakan ekonomi yang tidak pro neo-liberalisme sementara disisi lain Brazil membuat kebijakan yang pro neo-liberalisme untuk melakukan pemulihan ekonomi sehingga hal tersebut berdampak pada proses integrasi karena perbedaan kebijakan ekonomi makro. Masalah ekonomi tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Mercosur dikarenakan berdasarkan artikel 40 Protocolo de Ouro Preto, sebelum mengimplementasikan kebijakan yang dibuat Mercosur, negara anggota harus melalui tiga proses: 1. Penyesuaian terhadap hukum domestik, 2. Melaporkan sekretariat Mercosur bahwa negara menyetujui keputusan dan 3. Menerapkan kebijakan tersebut terhitung 30 hari setelah laporan di terima oleh sekretariat Mercosur (Schelhase M. , 2010, p. 176).

Berdasarkan artikel tersebut, posisi Mercosur tidak cukup kuat untuk melakukan tindakan nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan fakta bahwa bentuk perekonomian dan perpolitikan di negara anggota berbeda satu sama lain dan hal itu menimbulkan benturan kepentingan nasional antara negara anggota. Sebagian besar, kebijakan Mercosur terhenti pada proses pertama dikarenakan setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda, dengan kata lain, Mercosur tidak berhasil dan cukup kuat dalam menciptakan integrasi kawasan. Penelitian ini akan lebih lanjut menganalisis kegagalan Mercosur dalam melakukan integrasi kawasan melalui sudut pandang postfunctionalism.

## **I.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi keaktifan Brazil di Mercosur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Mengapa Mercosur gagal melakukan integrasi antarnegara anggota?**

## **I.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi perkembangan Mercosur sebagai blok perdagangan di Amerika Latin
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang menyebabkan gagalnya proses integrasi di Mercosur
3. Untuk mengetahui hubungan politik domestik terhadap kegagalan Mercosur dalam melakukan integrasi.

#### **I.4 SIGNIFIKANSI**

Penelitian ini dianggap penting mengingat Mercosur merupakan salah satu blok perdagangan terbesar di dunia. Poin selanjutnya yang membuat penelitian ini penting untuk dibahas adalah karena saat ini Mercosur masih berjuang dalam melakukan integrasi kawasan ditengah perbedaan kondisi perpolitikan dan perekonomian negara anggota. Sebagian besar penelitian yang ada kurang menyoroti dari sisi gejolak domestik yang terjadi di masing-masing negara anggota yang berdampak pada kegagalan Mercosur dalam mewujudkan integrasi kawasan. Oleh karena itu, skripsi ini akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda di mana penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi kegagalan proses integrasi Mercosur. Penulis juga akan meneliti lebih jauh gejolak politik domestik negara anggota terkait proses integrasi Mercosur.

#### **I.5 LINGKUP PENELITIAN**

Dari topik dan studi kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa skop penelitian ini adalah regionalisme dan ekonomi politik Amerika Latin. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kegagalan integrasi Mercosur di akibatkan adanya politik dari aktor non negara yang berdampak pada perubahan kebijakan ekonomi makro yang menghambat proses integrasi kawasan di bawah Mercosur.

Menarik untuk diperhatikan bahwa unsur politik didalamnya membuat pemerintah mengalihkan fokus kebijakannya terkait komitmennya mengenai integrasi kawasan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil faktor politik dari berbagai aktor di masing-masing negara anggota yang berdampak pada perubahan arah kebijakan ekonomi terkait integrasi.

## **I.6 KAJIAN PUSTAKA**

Kajian terkait Brazil dapat di temukan di artikel yang ditulis oleh Thomas Andrew o'Keefe yang secara garis besar membahas Brazil dengan menyinggung peran dan fungsi Mercosur sebagai organisasi regional di Amerika Latin. Menurut penulis, Brazil merupakan salah satu aktor penting di regional tersebut. Hal tersebut terlihat pada saat krisis finansial Brazil tahun 1999 di mana salah satu penyebabnya adalah perbedaan yang sangat besar antara Brazil dan Argentina dari sisi kebijakan ekonomi yang bersifat makro di mana krisis tersebut berpengaruh cukup besar dalam sejarah proses integrasi ekonomi antar negara di Amerika Latin khususnya yang termasuk kedalam anggota Mercosur. Secara keseluruhan tulisan tersebut memandang optimis pada Brazil dan Mercosur dimana Brazil adalah aktor yang sangat berpengaruh di regional tersebut yang mampu menciptakan persatuan regional dan mewujudkan integrasi ekonomi sebagaimana yang telah di cantumkan kedalam cita-cita pembuatan blok perdagangan Mercosur (Kazon & Building, 2010).

Pandangan optimis mengenai Brazil dan integrasi ekonomi regional Amerika Latin melalui Mercosur yang disampaikan oleh Thomas Andrew O'Keefe tersebut didukung oleh Mario E. Carranza. Di dalam tulisannya, Mario percaya bahwa

integrasi ekonomi di regional Amerika Latin sangat mungkin terjadi. Hal itu didasarkan pada anggapan bahwa Mercosur merupakan *custom union* terbesar kedua di dunia setelah EU di mana hal tersebut seolah memperlihatkan bahwa Mercosur merupakan salah satu aktor yang sangat penting dalam perjanjian dagang internasional. Menurut Mario, perjanjian FTAA di benua Amerika tidak akan terjadi tanpa keterlibatan Mercosur. Meskipun penulis mengakui bahwa ada perselisihan dan perbedaan kebijakan ekonomi yang bersifat makro antara Brazil dan Argentina seperti yang sudah dituliskan oleh Thomas pada paragraf pertama, hal tersebut tidak akan berpengaruh besar bagi proses integrasi.

Bahkan ia menyatakan bahwa perdagangan antar negara khususnya anggota Mercosur mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada masa krusial pada tahun 1991 di mana angka perdagangannya sebesar 52 miliar US Dollar dan mengalami peningkatan pada tahun 1997 sebesar 20.3 miliar US Dollar. Angka tersebut memperlihatkan bahwa hubungan dagang antar negara semakin membaik dan mengarah pada proses integrasi ekonomi. Meskipun Mercosur memiliki prospek yang sangat baik dalam menciptakan proses integrasi ekonomi di kawasan, penulis menuliskan bahwa Mercosur akan menemukan beberapa kendala khususnya pada saat negara anggota mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat pada saat resesi ekonomi di Argentina di mana angka ekspor antar negara mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 11% pada tahun 2002 dari 25% pada tahun 1998 di mana krisis tersebut mampu di atasi setelah negara anggota membentuk *Extraordinary Mercosur Summit Meeting* di Buenos Aires. Hal tersebut kemudian semakin

mempebesar rasa optimis Mario bahwa solidaritas antar negara anggota Mercosur akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan tantangan yang ada di internal (Carranza, 2004).

Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Carlos Ricardo Caichiolo menilai pesimis terhadap persatuan regional dengan mengidentifikasi kepentingan Brazil. Pada awalnya, Carlos menjelaskan bahwa Mercosur merupakan salah satu contoh yang baik untuk menggambarkan proses langsung dari negosiasi perdagangan yang dilakukan antar negara anggota. Namun, Carlos menilai bahwasannya hanya ada satu aktor yang memiliki pengaruh yang cukup besar yaitu Brazil. Carlos menilai bahwa penciptaan Mercosur hanya digunakan Brazil untuk mendapatkan citra yang baik di level regional dan internasional sedangkan bagi negara anggota lainnya yang memiliki perekonomian lebih rendah dibandingkan Brazil, Mercosur dianggap penting untuk mendorong perekonomian negara. Menurut Carlos, Brazil ingin dilihat oleh dunia sebagai negara yang peduli terhadap integrasi di kawasan. Selain itu, penulis juga menilai bahwa dominasi Brazil di Mercosur seolah membentuk pandangan bahwa Brazil ingin membuat organisasi tersebut bersifat supranasional. Selain itu, upaya mencuri pandangan dunia tersebut telah diperlihatkan oleh Brazil melalui pidato-pidato yang disampaikan oleh beberapa presiden di berbagai acara di mana pidato tersebut berbicara tentang komitmen Brazil untuk mendorong persatuan kawasan dan mengimplementasikan secara menyeluruh kepentingan politik negara Brazil di regional.

Selanjutnya, pandangan pesimis Carlos tersebut dikarenakan banyak dari perjanjian dan pidato yang disampaikan oleh kepala negara anggota tidak terimplementasi. Hal itu dikarenakan masih banyak kendala dan permasalahan didalamnya. Carlos menambahkan bahwa permasalahan tersebut berupa dana atau *budget* dan permasalahan yang berbasis pada kepentingan politiknya. Selain itu, negara anggota juga dianggap tidak cukup kuat untuk menyatukan kawasan regional dan keterbatasan Mercosur yang rentan terhadap krisis ekonomi yang terjadi di negara anggota (Caichiolo, 2017). Penelitian serupa juga dikemukakan oleh L. Maldaner yang melihat keikutsertaan Brazil di organisasi regional Mercosur justru akan menempatkan Brazil pada posisi yang kurang baik di mana pasar Brazil yang sangat luas akan dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Selain itu, Mercosur juga dianggap terlalu lambat dalam memutuskan suatu kebijakan khususnya perekonomian. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada ekonomi Brazil. Selain itu, Maldaner juga menyatakan bahwa Brazil bisa saja tidak ikut serta dalam pembentukan organisasi regional tersebut. Hal tersebut mengacu pada data di mana angka ekspor Brazil justru jauh lebih besar ke negara-negara diluar Amerika Latin seperti NAFTA, EU, Asia dan lainnya. (Maldaner, 2010). Selanjutnya, menurut penulis produktifitas kerja sama perdagangan Brazil jauh lebih meningkat dan signifikan dengan negara-negara atau aktor-aktor diluar negara anggota Mercosur pada periode 1998-2007.

Sementara itu, menurut Pablo M. Bentes, kerja sama Brazil-EU memiliki prospek yang jauh lebih cepat dan menjanjikan dibandingkan melalui Mercosur yang

memiliki banyak hambatan terutama dalam kebijakan agrikultur dan sektor strategis lainnya. Untuk itu, pada tahun 2007, Brazil dan EU membentuk sebuah kerangka perjanjian yang disebut *Brazil-EU Strategic Partnership* yang menurut Pablo secara khusus membahas 5 hal seperti ekonomi makro global, kebijakan perdagangan, isu *climate change*, *international norm* dan kebijakan pertahanan serta isu-isu mengenai integrasi kawasan (Bentes, 2015).

Penelitian ini akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda di mana penulis akan melihat lebih dalam dari sisi perpolitikan domestik negara anggota untuk mengambil sebuah kebijakan yang berdampak pada proses integrasi Mercosur. Penulis juga akan membahas isu-isu yang ada di negara anggota terkait integrasi kawasan.

## **I.7 KERANGKA KONSEP**

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan cabang dari teori integrasi regional yaitu Intergovernmentalism dan Postfunctionalism yang diambil dari artikel yang ditulis oleh Frank Schimmelfennig yang berjudul *Regional Integration Theory*. Beberapa hal yang melatarbelakangi penggunaan dua perspektif tersebut dikarenakan: *pertama*, aktor yang berperan selama proses integrasi Mercosur mengalami perkembangan dari hanya negara menjadi beberapa aktor seperti kelompok kepentingan, elit politik dan asosiasi masyarakat. *Kedua*, outcome integrasi berupa gagalnya Mercosur dalam mewujudkan integrasi. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan perspektif Neofunctionalism karena: *pertama*, aktor dalam proses integrasi tidak hanya

kelompok bisnis atau MNC tetapi juga asosiasi masyarakat dan elit politik. Kedua, dalam proses integrasi Mercosur tidak terbentuk sistem supranasional seperti EU. *Ketiga*, outcomes integrasi dari Mercosur belum menunjukkan kecenderungan terwujudnya integrasi.

Secara umum, teori regional integration adalah teori yang dibuat untuk menganalisis pembentukan suatu organisasi regional. Ide utama dari teori tersebut adalah untuk mengetahui alasan sebuah negara melakukan transfer otoritas politik domestik ke organisasi regional, mengetahui bagaimana organisasi regional mampu memperluas tugas, wewenang dan anggotanya serta untuk mengetahui dampak organisasi regional terhadap negara anggota dan masyarakat yang ada di dalamnya. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengetahui aktor dalam organisasi regional, motivasi pembuatan organisasi regional dan alasan sebuah negara menerima atau menolak keberadaan organisasi regional tersebut. Teori ini dibagi ke dalam tiga klasifikasi yaitu intergovernmentalism, neofunctionalism dan postfunctionalism. Sebelum menganalisis melalui postfunctionalism penulis akan terlebih dahulu menjelaskan intergovernmentalism dan neofunctionalism sebagai berikut:

#### **a. Intergovernmentalism**

Intergovernmentalism merupakan skema yang berbasis pada asumsi dasar dimana negara merupakan aktor utama di politik internasional sehingga keputusannya akan berbentuk rasional. Skema ini juga menekankan bahwa integrasi regional merupakan hasil dari negosiasi antar pemerintah negara anggota. Di dalam skema ini terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu realist intergovernmentalism dan liberal

intergovernmentalis. Pandangan realis berasumsi bahwa negara merupakan aktor tunggal dimana poin penting keterlibatannya di organisasi regional sangat dipengaruhi oleh otonomi dan keamanan. Pandangan ini menyatakan bahwa sebelum memperdulikan kesejahteraan rakyatnya, sebuah negara harus memastikan bahwa negaranya terbebas dari segala bentuk ancaman keamanan. Di sisi lain, pandangan liberal beranggapan bahwa preferensi sebuah negara di organisasi regional sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan. Pandangan ini menilai bahwa jika sebuah negara terdapat kelompok kepentingan yang berpengaruh dalam pasar regional, maka sebuah negara akan menuntut kebijakan baik itu bersifat liberalism ataupun proteksionisme sehingga hasilnya akan memberikan keuntungan kepada produsen lokal di negaranya.

#### **b. Neofunctionalism**

Berbeda halnya dengan intergovernmentalism yang memandang bahwa negara merupakan aktor tunggal dalam proses integrasi organisasi regional, neofunctionalism memandang bahwa terdapat aktor lain yang berpengaruh selain negara yaitu kelompok kepentingan yang bersifat transnasional. Neofunctionalism melihat bahwa kelompok tersebut akan mampu meminimalisir Batasan negara sehingga relokasi otoritas di level regional ataupun supranasional akan memiliki progress yang cepat dikarenakan organisasi tersebut akan menggunakan sumberdaya yang dimiliki transnasional dalam mempengaruhi arah kebijakan sebuah negara. Secara umum, neofunctionalism menginginkan proses integrasi yang lebih progresif dengan tidak hanya terbatas pada aktor negara dan high politics saja tetapi juga memberikan spill over baik itu

broadening, deepening ataupun widening sebuah organisasi regional. Namun, meskipun skema ini menginginkan proses integrasi yang lebih komprehensif, skema ini juga beranggapan bahwa jika terjadi integrasi kebijakan antar negara, maka akan sangat bersiko dalam terciptanya proses yang bersifat stagnan, disintegrasi dalam hal kontestasi antarpemerintah dan krisis jika mereka tetap berada di posisi kritis dari interdependensi transnasional dan kapasitas supranasional.

### **c. Postfunctionalism**

Ketiga klasifikasi intergovernmentalism, neofunctionalism dan postfunctionalism merupakan bagian dari tahapan-tahapan dalam terciptanya organisasi regional yang terintegrasi. Jika intergovernmentalism hanya terbatas pada negara sebagai aktor tunggal dalam pembentukan organisasi regional, neofunctionalism menekankan pada keterlibatan aktor transnasional sehingga akan tercipta regional yang terintegrasi tidak hanya di sektor politik saja maka postfunctionalism menekankan bahwa integrasi yang mencakup semua aspek tersebut akan menimbulkan reaksi di dalam politik domestik sebuah negara sehingga akan merusak proses integrasi pada tahapan yang lebih lanjut. Berbeda dengan dua skema sebelumnya, postfunctionalism tidak menekankan kepada efisiensi dari integrasi regional melainkan pada nilai self determination dimana poin penting tersebut akan terganggu dengan integrasi yang bersifat broaden, deepens dan widen.

Perluasan cakupan organisasi regional di level kebijakan yang memiliki hubungan terhadap identitas dan solidaritas sebuah komunitas, demokrasi dan keberagaman budaya akan mengganggu self determination dari kelompok yang ada di

sebuah negara. Dengan kata lain, akan ada bentuk politisasi di ruang lingkup domestik sebuah negara yang dilakukan oleh kelompok atau partai politik yang merasa kepentingannya terancam untuk menolak proses integrasi tersebut. Semakin progresif proses integrasi maka akan semakin membatasi self determination yang bersifat kolektif suatu kelompok di sebuah negara sehingga hal tersebut akan menciptakan politisasi dan penolakan di level nasional suatu negara.

Berikut merupakan tabel perbedaan dari ketiga perspektif teori integrasi regional yang dibagi kedalam beberapa variabel:

**Tabel 1.1 Peta Konsep Intergovernmentalism, Neofunctionalism dan Postfunctionalism**

Variabel	Intergovernmentalism	Neofunctionalism	Postfunctionalism
<b>Actors</b>	States	Transnational: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interest groups, industrial urban environment, etc</li> </ul>	Multi-level governance / ladder of governance
<b>Governmental Preferences</b>	The commercial interest of powerful economic producers	Ideational factors: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identities, values. Norms, and knowledge</li> </ul>	Two dimensions: <ul style="list-style-type: none"> <li>• National and democratic self-determination</li> <li>• Efficiency often calls for an expansion of political units, self determination is better served in smaller units</li> </ul>
<b>Demand</b>	National Interests: <ul style="list-style-type: none"> <li>• which consists of safeguarding the autonomy and the security of state</li> </ul>	Spill-over: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broadening, deepening, widening integration process and permissive consensus</li> </ul> State preferences shift: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exogenous: Geopolitical and domestic change</li> <li>• Endogenous: Converge in response to integration itself</li> </ul> Supranational Institutional	Self-determination <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trigger domestic pressure for less integration</li> <li>• Constraining dissensus</li> </ul>
<b>Supply</b>	Mutually beneficial arrangement and producing mutual benefits	Path-dependence: Which is influenced by: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Various types of spill-over</li> <li>• High sunk and exit costs.</li> <li>• Decision making procedures</li> </ul>	Politicized

<b>Integration outcomes and feedback</b>	Interdependence: integration between countries and policies	More integration	Self-defeating or self-limiting integration process
--	---	------------------	---

Berdasarkan tabel diatas, teori regional integration membahas integrasi kawasan dari berbagai perspektif seperti intergovernmentalism, neofunctionalism dan postfunctionalism. Dalam penelitian ini, perspektif yang paling tepat untuk di gunakan sebagai alat dalam menganalisis permasalahan yang ada di Mercosur sehingga tidak berhasilnya integrasi antarnegara anggota adalah intergovernmentalism pada tahun 1991-1999 dan postfunctionalism pada tahun 2000-2018. Penggunaan intergovernmentalism dan postfunctionalism akan mampu menjawab rumusan masalah dimana akan dianalisis:

### **1. Actor**

Dalam memandang proses integrasi, intergovernmentalism menekankan pada negara sebagai aktor utama dan rasional dalam proses negosiasi integrasi sehingga keberhasilan integrasi akan sangat bergantung pada arah politik negara anggota. Perspektif postfunctionalism memandang bahwa aktor yang terlibat kedalam negosiasi integrasi regional adalah multi-level governance. Multi-level governance adalah aktor yang terdiri dari berbagai otoritas publik seperti dalam negeri NGO dan social movements yang mempengaruhi pembuatan proses di level pemerintah terutama dalam proses integrasi regional.

### **2. Governmental Preferences**

Intergovernmentalism menilai bahwa preferensi negara dalam membuat kebijakan akan didasarkan pada kepentingan nasional sedangkan berdasarkan perspektif postfunctionalism, preferensi pemerintah dalam membuat arah kebijakan terkait integrasi regional berdasarkan pada dua dimensi kepentingan mendasar yaitu nasional dan democratic self-determination. Kedua dimensi tersebut memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Efisiensi dari integrasi sering menuntut adanya perluasan politik sementara self-determination lebih baik hanya dilayani dalam ruang lingkup yang kecil.

### **3. Demand**

Intergovernmentalism menilai bahwa kepentingan nasional negara yang terdiri dari keamanan dan ekonomi sangat mempengaruhi proses integrasi. Di dalam postfunctionalism salah satu poin penting yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses integrasi adalah demand yang terdiri dari self determination dan constraining dissensus. Self determination diartikan sebagai kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh setiap individu di dalam sebuah organisasi regional dalam menentukan arah politiknya. Hal ini yang kemudian ingin dibahas di dalam penelitian ini dimana akan diketahui pengaruh dari kepentingan setiap negara anggota di dalam Mercosur sehingga hal tersebut berpengaruh pada tidak tercapainya self determination yang bersifat kolektif dikarenakan ada perbedaan kepentingan. Sementara itu constraining dissensus dalam postfunctionalism diartikan sebagai sebuah kondisi dimana tidak tercapainya konsensus antar negara anggota dikarenakan berbagai faktor justru akan menjauhkan negara-negara anggota dari proses integrasi regional yang dimana hal

tersebut berlawanan dengan permissive consensus pada neofunctionalism yang percaya bahwa tidak tercapainya konsensus justru akan mendekatkan negara anggota kepada proses integrasi yang lebih lanjut.

#### **4. Supply**

Intergovernmentalism menilai bahwa untuk mewujudkan proses integrasi negara anggota harus membuat peraturan yang bisa menghasilkan keuntungan bersama. Berdasarkan perspektif postfunctionalism, selain self determination, politisasi politik domestik negara anggota juga bisa mempengaruhi proses integrasi kawasan yang lebih lanjut. Politisasi ini muncul akibat adanya kelompok kepentingan atau partai politik yang merasa tidak diuntungkan atas proses integrasi kawasan tersebut sehingga kelompok tersebut akan melakukan berbagai usaha penolakan terhadap proses integrasi yang secara tidak langsung mempengaruhi arah politik pemerintah yang sedang berkuasa.

#### **5. Integration outcomes and feedback**

Berdasarkan perspektif intergovernmentalism, outcome dari proses integrasi adalah adanya hubungan erat antara negara dan kebijakan sehingga integrasi akan bisa diwujudkan. Menurut postfunctionalism, outcomes yang dihasilkan oleh proses integrasi tersebut adalah self-defeating atau self-limiting integration process. Pandangan postfunctionalism terhadap integrasi regional tersebut dikarenakan semakin proses integrasi regional mengalami progress maka akan semakin menekan dan membatasi collective self-determination sebuah komunitas nasional di sebuah

negara sehingga menimbulkan reaksi penolakan dan bahkan politisasi di level domestic. Hal tersebut akan berpengaruh pada outcomes proses integrasi yang bersifat stagnan dan bahkan mengalami kemunduran.

## **I.8 METODE PENELITIAN**

Riset ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam ilmu sosial dan politik, penelitian kualitatif biasa digunakan sebagai metode utama dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh sifat ilmu sosial yang mendasarkan pengetahuannya pada dinamika interaksi sosial. Karena interaksi sosial adalah fenomena abstrak maka tidak dapat sepenuhnya dihitung.

Dalam penelitian ini, data yang didapat oleh penulis berasal dari sumber primer serta juga berasal dari sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud ialah laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait dari negara Brazil yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal-jurnal, berita serta data yang dikeluarkan oleh badan-badan peneliti yang melakukan penelitian terhadap isu yang dibawa di rumusan masalah.

Penerapan metode kualitatif dalam riset ini adalah karena riset ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Brazil dalam perdagangan internasional di bawah mekanisme WTO yang mempengaruhi kecilnya volume perdagangan di bawah mekanisme Mercosur. Karena hasil penelitian ini bersifat analisis dan deskripsi, maka metode penelitian kualitatif akan sesuai dengan hasilnya.

## **I.9 PROSES PENELITIAN**

Proses penelitian merupakan suatu tahapan yang mencakup perencanaan atau langkah dalam melakukan riset dimulai dari pra riset sampai interpretasi penelitian atau laporan penelitian. Prosedur ini dianggap penting karena sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan riset. Adapun prosedur yang digunakan dalam riset ini adalah sebagai berikut;

### **1. Pra Riset**

Pra riset merupakan kegiatan untuk persiapan riset yang termasuk: melihat hasil laporan terkait penelitian, membaca bahan bacaan sesuai dengan penelitian.

### **2. Pengambilan Data**

Dalam mengambil sebuah data, riset ini mendapatkan data dari sumber sekunder. Adapun yang termasuk ke dalam sumber sekunder adalah seperti media tertulis, mencakup: buku teks akademis, pernyataan resmi pemerintah Brazi dan publikasi, surat kabar harian ataupun majalah berkala. Sumber sekunder dipilih berdasarkan pada reputasi kredibilitas media / penerbit dan hubungannya dengan topik riset

### **3. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah dalam menganalisis data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah ini berfokus pada pengumpulan semua data yang telah di dapat dari berbagai sumber

b. Membaca semua data

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data yang telah di dapat perlu untuk dibaca secara menyeluruh. Proses ini memungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data. Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan bacaan dengan cepat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memilih materi terkait dan mengidentifikasi pernyataan atau argument terkait.

c. Pengkodean

Proses pengkodean melibatkan upaya pelabelan data tertentu dalam riset. Kisaran kode dapat dikembangkan selama proses analisis.

d. Mengaitkan tema/deskripsi

Fase ini melibatkan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk menemukan korelasi antara tema dan kategori.

e. Interpretasi arti

Tahap terakhir dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam riset ini adalah untuk menafsirkan makna data. Interpretasi adalah tindakan menjelaskan sesuatu, dalam hal ini adalah catatan terkait dokumen dan bahan bacaan.